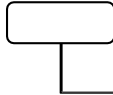
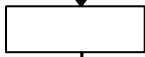
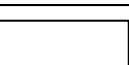
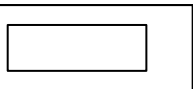
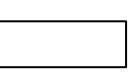
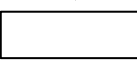
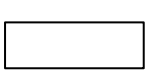
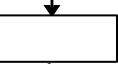

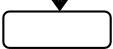




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**  
**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

 <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,</b> <b>PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH</b> <b>BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b> <b>PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>	<b>Nomor POS</b>	: P4.01/C7.28/OT.01.00/2024
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 01/10/2024
	<b>Tanggal Revisi</b>	: -
	<b>Tanggal Efektif</b>	: 10/10/2024
	<b>Disahkan Oleh</b>	: <div style="text-align: right;"> <b>Ketala</b>  Nama : Sinar Alam, S.Pd.,M.Pd. NIP : 1971092620032003121001</div>
<b>Nama POS</b>	: Uji Konsekuensi Informasi Publik	
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
1, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintah 4, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan	1, Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 2, Mampu menganalisis setiap permasalahan 3, Mampu mengoperasikan komputer	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
1, POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2, POS Pengumuman Informasi Publik	1, Lembar Disposisi 2, Komputer/Scanner/Printer	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
1, Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2, Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh	1, Dicatat dalam berkas Arsip satuan kerja secara elektronik dan/atau manual	

POS Uji Konsekuensi Pelayanan Publik

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja (PPID)	Koordinator PPID	Tim Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi publik yang belum masuk dalam daftar informasi publik dan berpotensi menjadi usulan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan				disposisi/surat pengantar	1 hari	daftar usulan informasi yang dikecualikan	
2	Memberikan arahan dan/atau pertimbangan atas usulan informasi yang akan dikecualikan				daftar usulan informasi yang dikecualikan	120 menit	Pertimbangan usulan informasi yang akan dikecualikan	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi informasi publik yang akan dikecualikan dengan Koordinator PPID				Pertimbangan usulan informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Hasil Koordinasi pertimbangan usulan yang akan dikecualikan	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim ahli sesuai usulan informasi yang akan dikecualikan				daftar usulan informasi yang dikecualikan	3 hari	Hasil uji konsekuensi usulan informasi yang akan dikecualikan	
5	Membuat laporan tertulis hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan dan melaporkannya kepada Atasan PPID				Hasil uji konsekuensi usulan informasi yang akan dikecualikan	60 menit	Laporan hasil uji konsekuensi usulan informasi yang akan dikecualikan	
6	Menerima laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan				Arsip Buku Register Bahan Tanggapan atas keberatan informais publik	60 menit	Laporan Hasil Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik	
7	Mendokumentasikan laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan				Laporan Hasil Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik	60 menit	Arsip	